

**KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR KOTA BENGKULU: AKAR  
MASALAH DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA****Oleh:****<sup>1</sup> Bobby Mandala Putra, <sup>2</sup> Evsa Wulan Suri, <sup>3</sup> Wahyu Aprian Saputra, <sup>4</sup> Elisabet Manalu, <sup>5</sup> Gery Andini Banjarnahor****Email Korespondensi: pmandalab@gmail.com****<sup>12345</sup> Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai akar masalah kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pandangan dunia advokasi/partisipatoris, metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Informan terdiri dari nelayan, penyuluh perikanan, pendamping PKH, pejabat politik/struktural dan peneliti/akademisi. Data diambil dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan Nvivo. Hasil penelitian menemukan bahwa masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir sangat kompleks. Terdapat tiga masalah utama pengentasan kemiskinan yang telah diidentifikasi. Tiga masalah utama tersebut adalah masalah alam dan lingkungan, masalah kebijakan dan masalah individu nelayan. Masalah alam dan lingkungan ini menjadi masalah pertama yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah pesisir karena mayoritas mereka adalah nelayan tradisional. Nelayan tradisional pendapatannya sangat tergantung pada hasil tangkapan ketika melaut. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan ekosistem laut yang sudah rusak parah mengakibatkan masyarakat pesisir menjadi kantong-kantong kemiskinan. Keberadaan kapal trawl yang terus beroperasi, limbah industri dan sampah plastik yang berada di laut merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan/ekosistem laut. Masalah kebijakan merupakan masalah yang paling krusial dalam mempengaruhi keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Masalah kebijakan terdiri dari tiga dimensi yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi, sedangkan masalah individu ini terdiri dari enam variabel yaitu alat tangkap, nilai-nilai budaya, manajemen keuangan, motivasi hidup, dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan titik ungkit untuk mengatasi masalah individu yang melekat pada nelayan. Untuk menyelesaikan masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif sampai ke akar masalahnya dan mengoptimalkan treatment pada titik ungkit penyelesaian masalah.

***Kata Kunci : Pengentasan Kemiskinan; Kemiskinan Pesisir; Masalah Kemiskinan; Kemiskinan Indonesia***

**POVERTY IN THE COASTAL AREAS OF BENGKULU CITY: ROOT CAUSES AND INFLUENCING FACTORS****Oleh:****<sup>2</sup> Bobby Mandala Putra, <sup>2</sup> Evsa Wulan Suri, <sup>3</sup> Wahyu Aprian Saputra, <sup>4</sup> Elisabet Manalu, <sup>5</sup> Gery Andini Banjarnahor****Correspondence email: [pmandalab@gmail.com](mailto:pmandalab@gmail.com)****<sup>12345</sup> Public Administration Program, Faculty of Social and Political Science, Prof. Dr. Hazairin, SH University****Abstract**

This research delves into the root causes of poverty in Bengkulu City's coastal areas, employing an advocacy/participatory worldview and qualitative methods. Informants, including fishermen, fisheries officers, Conditional Cash Transfer facilitators, officials, and researchers, were selected through purposive and snowball sampling. Data were gathered through interviews, observations, and documentation analyzed using Nvivo. Findings highlight the complexity of poverty alleviation, revealing three main issues. Environmental challenges linked to unfavorable weather and damaged marine ecosystems contribute to poverty pockets. Environmental degradation is caused by trawl boats, industrial waste, and plastic pollution. Policy problems pose a significant barrier to poverty alleviation success, covering formulation, implementation, and evaluation dimensions. Six individual variables, such as fishing gear and education level, influence poverty issues. Education emerges as a critical leverage point for addressing particular challenges. A comprehensive approach targeting root causes and leveraging critical points is essential for effective poverty alleviation in coastal areas.

***Key Words: Poverty Alleviation; Coastal Poverty; Issues of Poverty; Indonesian Poverty*****A. Pendahuluan**

Di usia kemerdekaan yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus 2023, cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh jutaan rakyat Indonesia yang masih berada dalam jurang kemiskinan. Badan Pusat Statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 adalah 9,57% atau 26,36 juta jiwa. Angka kemiskinan tersebut meningkat 0,03 persen atau 0,20 juta orang jika

dibandingkan pada Maret 2022.

Bengkulu merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera menjadi buah bibir ketika menjadi provinsi termiskin ke-7 di Indonesia dan provinsi termiskin ke-2 di Sumatera pada tahun 2022. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2023) diketahui bahwa penyumbang kemiskinan terbesar di Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu dengan persentase sebesar 19,99%. Saat ini jumlah penduduk miskin yang terdata di Kota Bengkulu sebesar 59,43 ribu atau 15,73% dari jumlah penduduknya.

Merujuk pada data kemiskinan di atas, jelas bahwa kondisi ini sangat disayangkan karena pemerintah sudah mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Langsung Tunai dan Non Tunai, Program Kartu Indonesia Pintar, Program Kartu Indonesia Sehat, dan Program Bedah Rumah (Putra & Abbas, 2019). Penelitian (Putra, 2020) menemukan bahwa program-program pengentasan kemiskinan tersebut belum berhasil memberikan dampak kebijakan yang diinginkan karena terdapat beberapa hambatan dalam tataran implementasi baik yang disebabkan oleh substansi kebijakan maupun yang disebabkan oleh implementasi kebijakan itu sendiri.

Kondisi ini menjadi lebih ironis karena kemiskinan ekstrem di Indonesia terkonsentrasi di wilayah pesisir. Kompas ID tanggal 26 Januari 2023 (Indraswari, 2023) melaporkan bahwa dari target penurunan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022, sebanyak 69,3 % merupakan berada di wilayah pesisir. Total jumlah penduduk miskin ekstrem di wilayah pesisir Indonesia adalah sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan pra penelitian, diketahui bahwa kemiskinan ekstrem di Kota Bengkulu juga terkonsentrasi di wilayah pesisir.

Indonesia memiliki potensi kekayaan laut mencapai Rp 19.840 triliun (Yanwardhana, 2022) seharusnya bisa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia dan masyarakat pesisir yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil laut dapat hidup lebih sejahtera apabila potensi kekayaan laut tersebut

dimanajemen dengan baik dan kebijakan pengentasan kemiskinan diredesain dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Namun demikian, program-program pengentasan kemiskinan harus terus didukung dan didorong menjadi prioritas pembangunan karena pengentasan kemiskinan tidak hanya soal angka statistik jumlah penduduk miskin, tetapi merupakan amanat dari konstitusi yang tertuang pada pasal 27 ayat 2, pasal 33 ayat 3 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

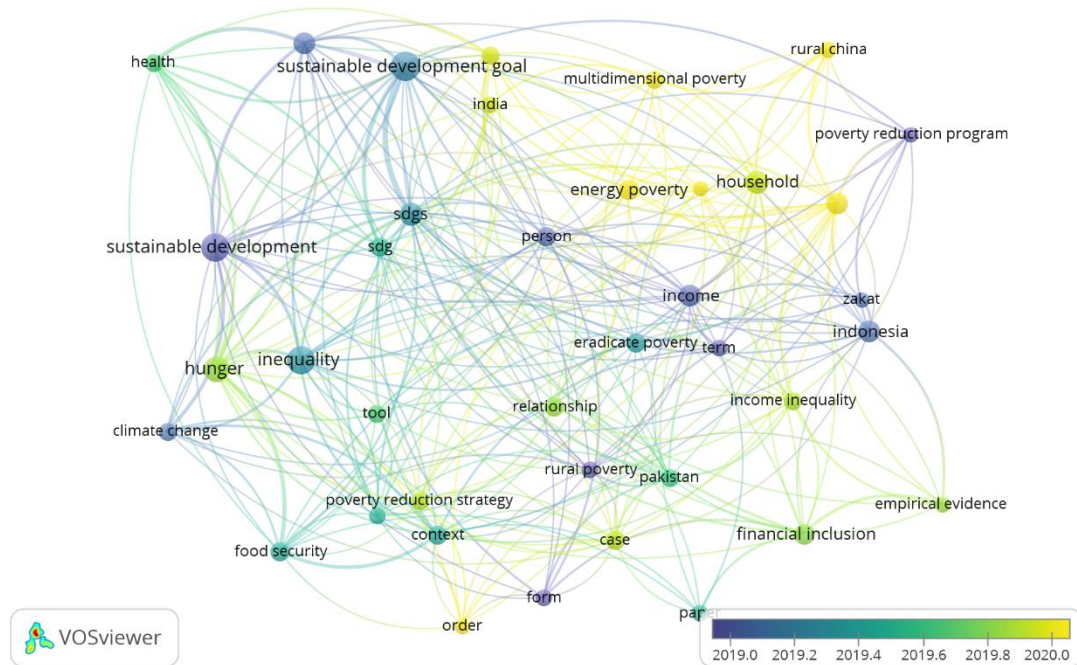
Ada banyak penelitian yang membahas tentang pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelusuran 500 artikel dengan kata kunci "*Poverty Reduction*" pada tahun 2018-2023 menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dan *Vosviewer* diketahui bahwa penelitian tentang penanggulangan kemiskinan terbagi ke dalam lima kluster penelitian. Pertama, penelitian-penelitian yang mengeksplorasi, mendeskripsikan dan menganalisis kemiskinan dan ketimpangan (lihat penelitian-penelitian (Baloch et al., 2020; Huynh & Nguyen, 2020; Kousar et al., 2019; Luo et al., 2020; Oviedo-García et al., 2019; Pan et al., 2020; Ullah et al., 2021; Wan, Hu, et al., 2021; Wan, Wang, et al., 2021).) Kedua, penelitian-penelitian yang mengelaborasi, menganalisis, dan mengevaluasi pengentasan kemiskinan rumah tangga (lihat penelitian-penelitian (Azeem et al., 2019; Eyasu, 2020; Islam & Alam, 2018; Li et al., 2022; Liu et al., 2021; Mustapa et al., 2018; Sharma et al., 2019; Su et al., 2021; Wang et al., 2021).) Ketiga, penelitian-penelitian yang membahas hubungan dan peran pemerintah terhadap pengentasan



dari perspektif ekonomi dengan basis penelitian kuantitatif, padahal kemiskinan itu adalah masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan penelitian yang lain. Salah satu penelitian yang melihat masalah kemiskinan dari perspektif kebijakan

publik adalah penelitian Putra (Putra, 2020; Putra & Abbas, 2019). Penelitian tersebut mengharapkan ada penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi masalah kemiskinan di daerah yang lain.

**Gambar A.2**  
*Overlay Visualization*



Sumber: Vosviewer, 6 April 2023

Gambar A.2 di atas menjelaskan bahwa penelitian tentang program pengentasan kemiskinan banyak dilakukan pada tahun 2019. Hal ini sangat disayangkan karena upaya pengentasan kemiskinan akan dipengaruhi oleh program pengentasan kemiskinan sehingga penelitian tentang pengentasan kebijakan dari perspektif kebijakan publik pada tahun 2023 masih sangat diperlukan khususnya di Kota Bengkulu yang masalah kemiskinannya belum terkendali.

**Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan, sebagai fenomena

multidimensional, telah didefinisikan dalam berbagai konteks dan perspektif. (Sen, 2001) memperluas pemahaman tentang kemiskinan tidak hanya sekadar ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan yang diakibatkan oleh kecilnya pendapatan, akan tetapi menekankan pada aksesibilitas terhadap peluang dan sumber daya. (Sachs, 2005) menemukan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, dia menggarisbawahi bahwa perlunya pendekatan holistik untuk mengatasi

masalah kemiskinan.

### ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan***

- a) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan. Keterkaitan antara pendidikan, keterampilan, dan kemiskinan telah menjadi fokus perhatian (Schultz, 2022); (Becker, 2005)). Pendidikan yang berkualitas tinggi memainkan peran kunci dalam membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan mobilitas sosial.
- b) Ketidaksetaraan Ekonomi. (Atkinson, 2003) dan (Piketty, 2014) melakukan analisis yang terhadap dampak ketidaksetaraan ekonomi dengan kemiskinan. Studi ini membahas peran kebijakan redistribusi dan pengaruh ketidaksetaraan pada kesempatan ekonomi bagi kelompok rentan. Mereka menyatakan bahwa ketidaksetaraan ekonomi memberikan dampak yang signifikan terhadap masalah kemiskinan.
- c) Akses Terhadap Sumber Daya. (Deaton, 2010) meneliti dampak akses terhadap sumber daya, penelitiannya menyoroti pentingnya distribusi tanah, air, dan modal finansial dalam membentuk struktur kemiskinan di berbagai konteks global.
- d) Kesehatan dan Kemiskinan. Hubungan antara kesehatan dan kemiskinan ditinjau oleh studi (Wilkinson, 2003), yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan kesehatan dapat memperkuat dan mempertahankan lingkaran kemiskinan.

### ***Konteks Lokal dan Kultural***

Analisis konteks lokal dan kultural, sebagai aspek penting penelitian kemiskinan, dapat ditemukan dalam karya-karya antropologi seperti (Geertz, 2000) dan (Appadurai, 2004). Studi ini menemukan bahwa nilai budaya dan struktur sosial lokal dapat memengaruhi persepsi dan pengalaman kemiskinan.

### ***Pemikiran Feminis dan Kemiskinan***

Pemikiran feminis, seperti yang ditemukan dalam karya (Fraser, 2009) dan (Elson, 2002), membuka ruang diskusi tentang dampak ketidaksetaraan gender dalam membentuk kondisi kemiskinan dan menyuarakan perlunya kebijakan yang berfokus pada inklusivitas gender.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensi sehingga memerlukan banyak penelitian yang dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, termasuk penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) apa masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Kota Bengkulu? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masalah pengentasan kemiskinan tersebut?

### **B. Metode Penelitian**

(Creswell, 2014) mengatakan bahwa seharusnya peneliti dalam memilih dan menetapkan rancangan penelitian berdasarkan pandangan dunia (*worldviews*) penelitian, metode penelitian dan strategi-strategi penelitian. Pilihan atas suatu rancangan penelitian hendaknya disesuaikan dengan masalah penelitian yang akan diteliti dan pengalaman pribadi peneliti.

### **Pandangan Dunia**

Meskipun gagasan filosofis tersembunyi di dalam sebuah penelitian, akan tetapi gagasan tersebut tetap mempengaruhi praktik penelitian. Setiap peneliti perlu memperjelas gagasan filosofisnya. Penjelasan itu akan menggambarkan alasan peneliti memilih strategi penelitian. Gagasan filosofis ini disebut sebagai pandangan dunia (*worldviews*) (Creswell, 2014).

Pandangan dunia dalam penelitian ini adalah advokasi/partisipatoris. Pandangan dunia ini berasumsi bahwa penelitian harus dihubungkan dengan politik atau agenda kebijakan sehingga penelitian yang berangkat dari pandangan dunia ini umumnya memiliki agenda aksi yang menginginkan adanya perubahan pada informan penelitian. Pandangan dunia ini menyatakan bahwa isu yang berkaitan dengan kehidupan sosial seperti pemberdayaan, kemiskinan, dan ketidakadilan perlu mendapatkan perhatian utama.

Dengan demikian, pemilihan pandangan dunia advokasi/partisipatoris ke dalam penelitian ini dinilai tepat karena isu yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan dan penelitian ini juga mengharapkan adanya perubahan pada informan penelitian di masa mendatang.

### **Metode Penelitian dan Strategi Penelitian**

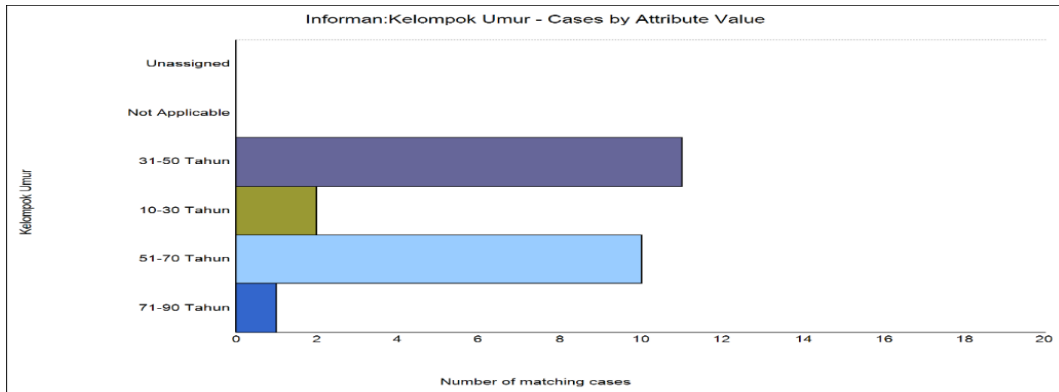
Menurut Creswell (Creswell, 2014) pandangan dunia advokasi/partisipatoris merupakan salah satu pandangan yang tepat di bawah ke dalam metode kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan

metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Studi kasus adalah strategi penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki atau mengeksplorasi suatu kebijakan/program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Kota Bengkulu sehingga strategi studi kasus ini menurut pengusul tepat untuk penelitian ini. Terdapat dua aspek dalam penelitian ini yaitu (1) Apa sebenarnya masalah pengentasan kemiskina di wilayah pesisir kota Bengkulu dan (2) Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi masalah pengentasan kemiskinan tersebut.

### **Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* berdasarkan kriteria yang ketat. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 24 orang yang terdiri dari (1) unsur masyarakat pesisir yang terdiri dari masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan dan masyarakat miskin bukan penerima program pengentasan kemiskinan serta tokoh masyarakat pesisir; (2) unsur pemerintah yang terdiri dari pelaksana, pengawas, tenaga fungsional dan unsur pimpinan dari institusi yang bertanggung jawab terhadap pengentasan kemiskinan atau institusi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan (3) Profesional yang terkait dengan pengentasan kemiskinan yang terdiri peneliti, akademisi dan *Non-Governmental Organization*.

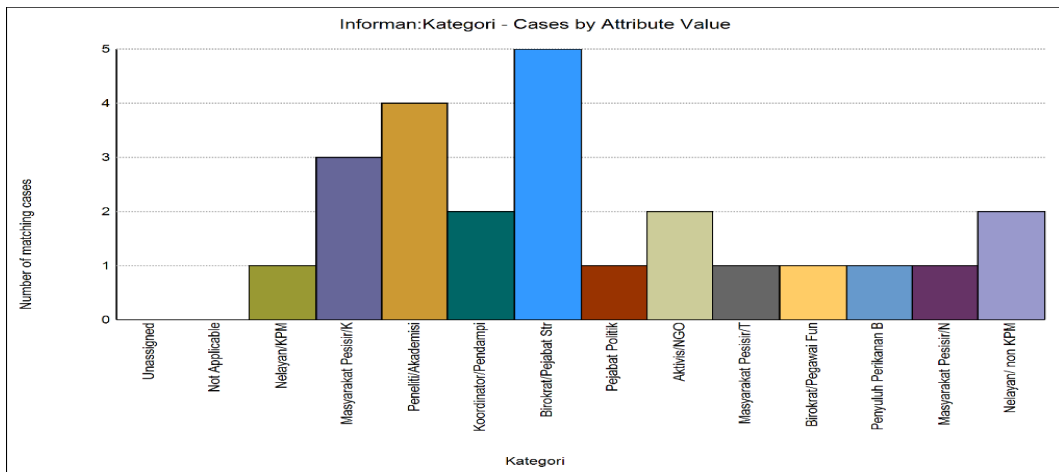
**Gambar B.1**  
**Visualisasi informan berdasarkan kelompok umur**



Berdasarkan gambar di atas, terlihat jelas bahwa informan yang berada pada kelompok umur 31-50 tahun sebanyak 11 orang informan yang berada pada kelompok umur

berusia 51-70 sebanyak 10 orang, informan yang berada pada kelompok umur 10-30 sebanyak 2 orang dan 1 orang informan yang berada di kelompok umur 71-90 tahun.

**Gambar B.2**  
**Visualisasi informan berdasarkan kategori/profesi**

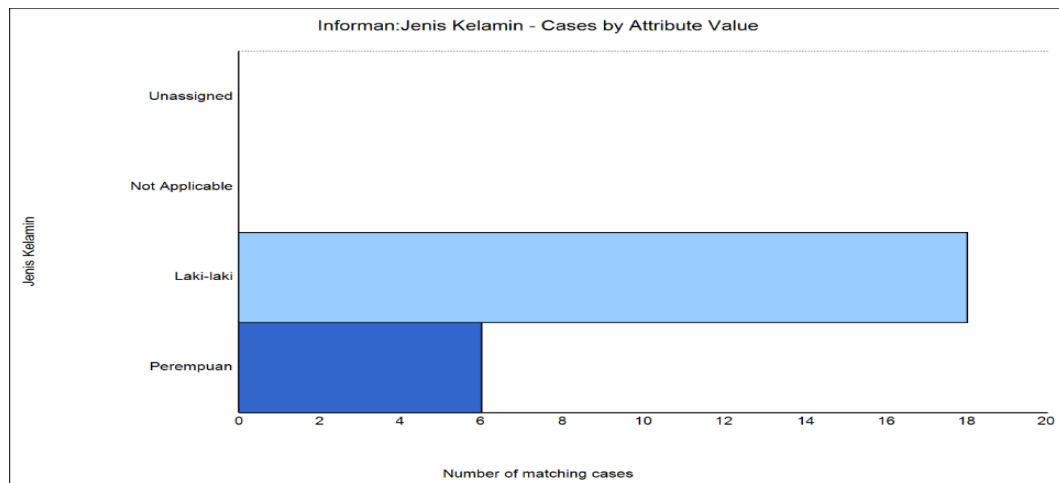


Berdasarkan gambar B.2 diketahui bahwa kategori informan yang paling mendominasi adalah birokrat/pejabat struktural, yang mendominasi ke dua adalah

peneliti/akademisi dan yang mendominasi kedua adalah masyarakat pesisir dan informan yang berkategori sebagai masyarakat pesisir keluarga penerima manfaat.



**Gambar B.3**  
**Visualisasi informan berdasarkan Jenis Kelamin**



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa mayoritas informan berjenis kelamin sebanyak 18 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil observasi lapangan dan wawancara kepada informan, sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumentasi, laporan, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Pengumpulan data akan terus dilakukan sampai peneliti menilai data yang telah terkumpul memadai dan siap untuk di analisis. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data induktif (Creswell, 2014) menggunakan aplikasi Nvivo.

### **Validitas dan Reliabilitas Data**

Validitas dalam kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas dalam kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan triangulasi sumber-sumber data, menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian dan mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### *Deskripsi Lokasi Penelitian*

Kota Bengkulu adalah ibu kota dari Provinsi Bengkulu yang mempunyai wilayah pesisir dengan panjang garis pantai  $\pm 17,22$  km. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Desember 2023 di wilayah pesisir di Kota Bengkulu. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2014

wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Berdasarkan definisi tersebut, maka dari 5 dari 9 kecamatan yang ada di kota Bengkulu adalah wilayah pesisir. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Sungai Serut. Namun demikian, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti maka penelitian ini tidak dilakukan di seluruh wilayah pesisir Kota Bengkulu, akan tetapi hanya dilakukan di tiga kecamatan dengan persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program pengentasan kemiskinan tertinggi di wilayah pesisir yang sekaligus menjadi tiga kecamatan dengan

persentase RTM KPM tertinggi di Kota Bengkulu. Persentase RTM KPM mengindikasikan tingkat keparahan kemiskinan di suatu wilayah. Semakin tinggi persentase RPM KPMnya maka semakin parah pula tingkat kemiskinannya. Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Pasar Bengkulu. Pada masing-masing kecamatan tersebut dipilih satu kelurahan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Berdasarkan rasionalisasi tersebut maka locus penelitian ini ditetapkan di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Sumber Jaya yang merepresentasikan Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Malabero yang merepresentasikan Kecamatan Teluk Segara, dan Kelurahan Pasar Bengkulu yang merepresentasikan Kecamatan Sungai Serut.

**Gambar C.1**  
**Peta Kota Bengkulu**

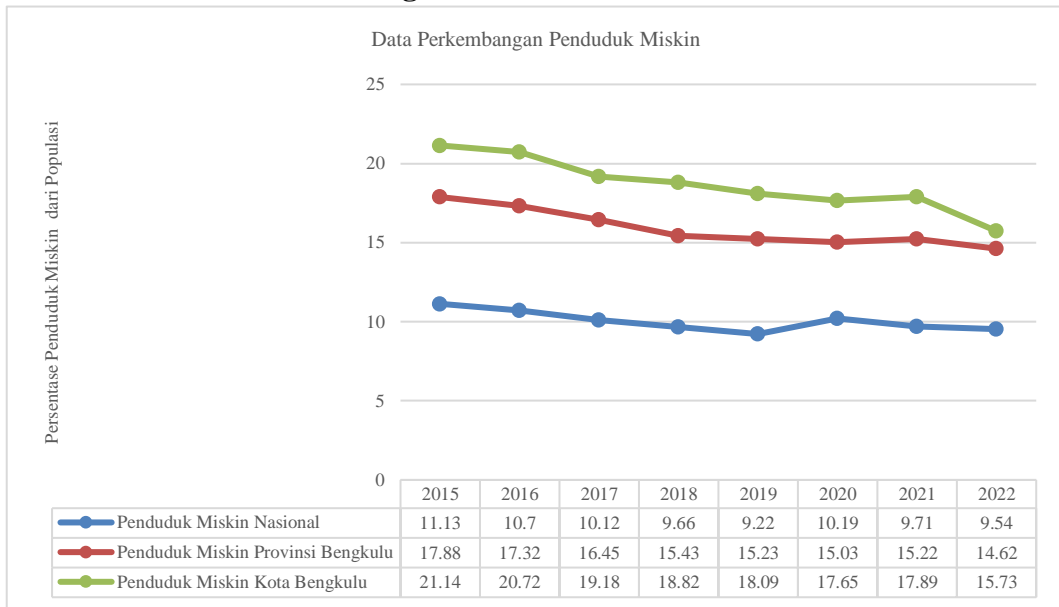


### Hasil Penelitian

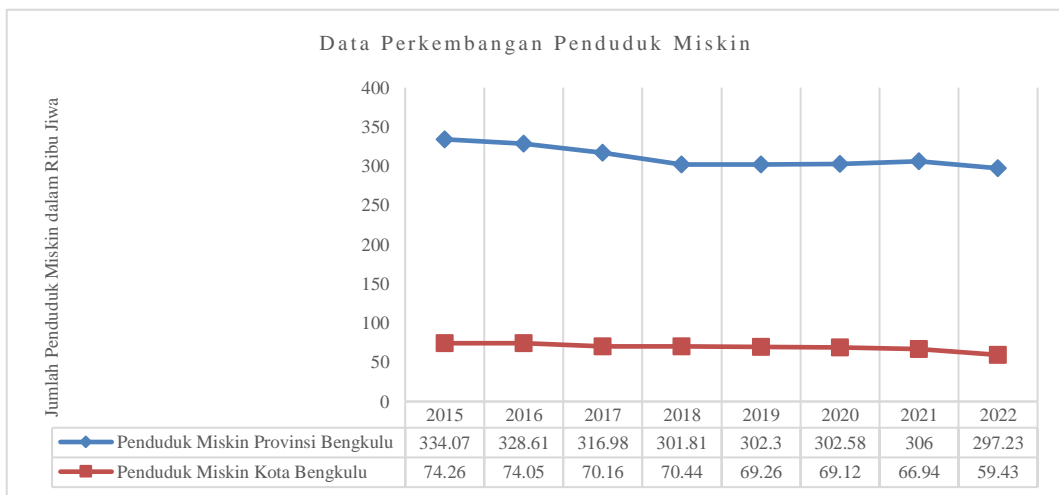
Hasil penelitian ini merupakan analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama periode penelitian dengan menggunakan

aplikasi Nvivo. Hasil penelitian ini secara umum akan disajikan melalui beberapa gambar atau tabel yang diambil dari aplikasi Nvivo.

**Gambar C.2**  
**Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu Tahun 2015-2022**



**Gambar C.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu Tahun 2015-2022**



Sumber: diolah dari data BPS dan P3KE, 2023

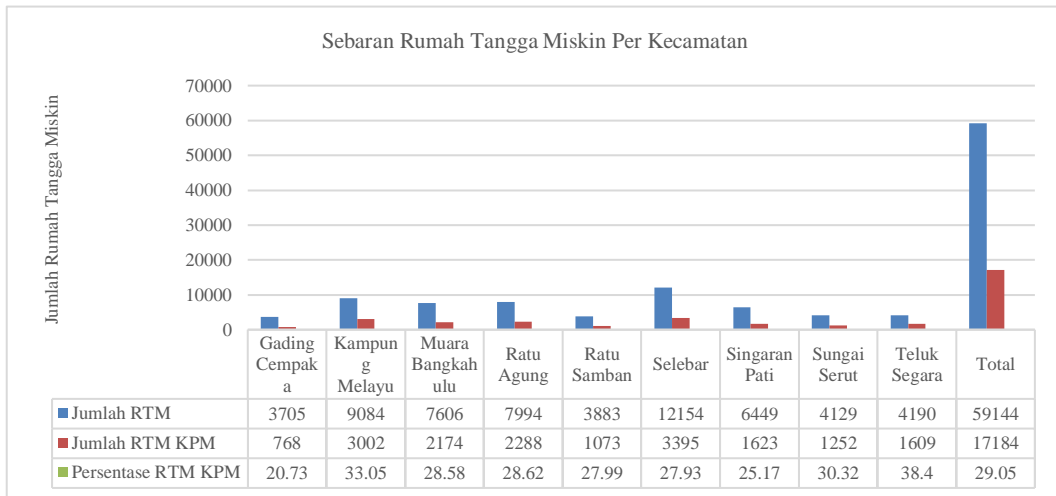
Berdasarkan gambar C.2 dan gambar C.3 di atas, diketahui bahwa masalah kemiskinan di Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu belum dapat ditangani dengan baik. Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir yaitu tahun 2015-2022, persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu selalu

berada di atas persentase penduduk miskin nasional dan persentase penduduk miskin di Kota Bengkulu selalu berada di atas persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu. Meskipun jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu cenderung mengalami penurunan, tetapi rata-rata persentase

penurunannya dalam kurun waktu tersebut hanya 0.77% per tahun. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2.16%, penurunan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0.36% dan terjadi peningkatan jumlah kemiskinan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0.24%. Jika dilihat dari jumlah jiwa penduduk miskin, maka puncak jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk

miskin sebesar 74, 26 ribu jiwa atau sebesar 21,14% dari populasi masyarakat Kota Bengkulu dan titik terendah jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 59,43 ribu jiwa atau 15,73% dari populasi masyarakat Bengkulu. Data ini cukup untuk membuktikan bahwa masalah kemiskinan di Kota Bengkulu masih belum dapat ditangani dengan baik.

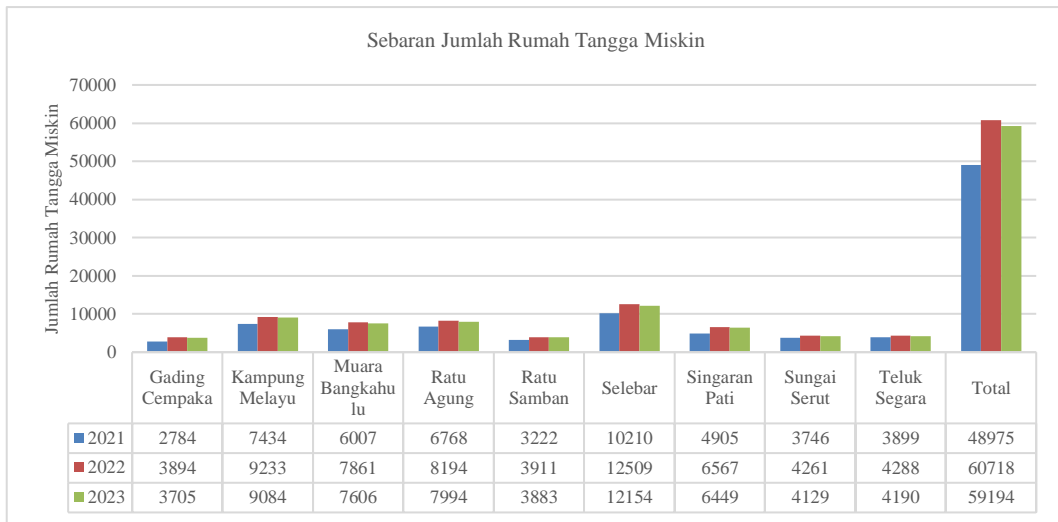
**Gambar C.4**  
**Sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Per Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2023**



Berdasarkan gambar C.4 di atas, diketahui bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bengkulu pada tahun 2023 sebesar 59.144 dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 17.184 atau 29,05% dari total RTM yang terdata dalam DTKS. KPM tersebut menerima program-program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

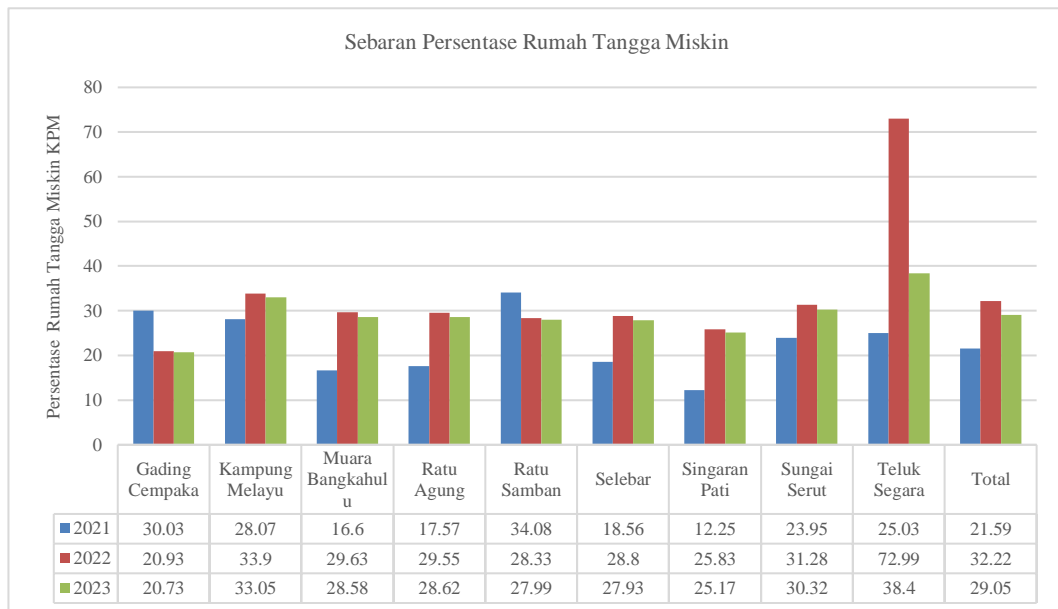
BPJS Kesehatan. Selanjutnya, diketahui bahwa tiga Kecamatan dengan persentase RTM KPM tertinggi semuanya terletak di wilayah pesisir. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Teluk Segara dengan persentase 38,4%, Kecamatan Kampung Melayu dengan persentase 33,05% dan Kecamatan Sungai Serut dengan persentase 30.32%. Kondisi ini membuktikan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Kota Bengkulu terletak di wilayah pesisir.

**Gambar C.5**  
**Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan**  
**di Kota Bengkulu Tahun 2021-2023**



Sumber: Diolah dari DTKS, 2023

**Gambar C.6**  
**Persentase RTM KPM Per Kecamatan**  
**di Kota Bengkulu Tahun 2021-2023**



Berdasarkan gambar C.5, diketahui bahwa jumlah RTM di Kota Bengkulu yang terdapat di dalam DTKS mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah RTM di Kota Bengkulu bertambah sebesar 11.743

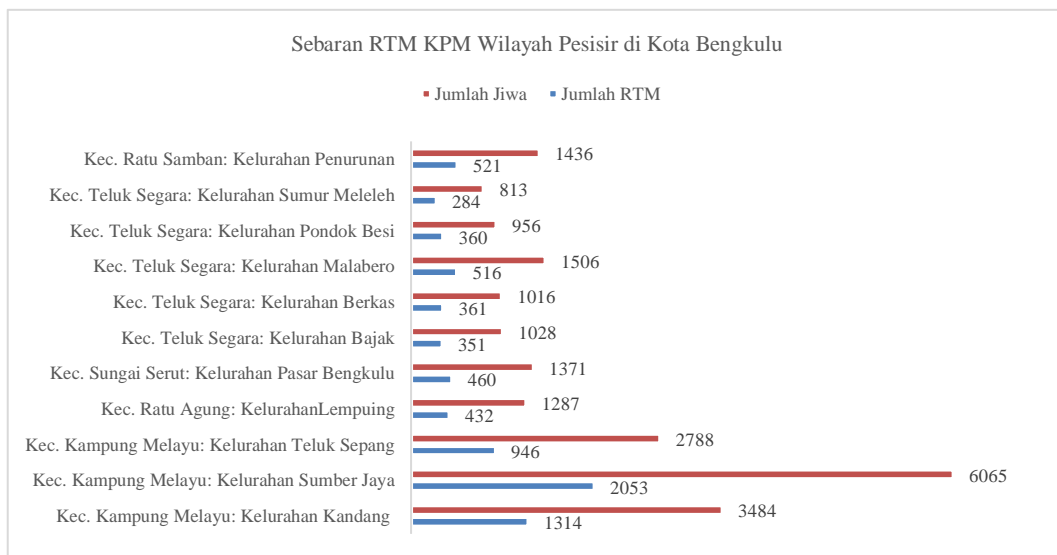
atau meningkat 23,97% dari jumlah RTM tahun 2021 dan pada tahun 2023 RTM di Kota Bengkulu berkurang sebesar 1.524 atau turun sebesar 2,5% dari jumlah RTM tahun 2022. Namun demikian, jika dihitung

jumlah RTM di Kota Bengkulu dari tahun 2021-2023 maka terdapat peningkatan jumlah RTM sebesar 10.219 atau meningkat sebesar 20,86%. Khusus di kecamatan yang berada di wilayah pesisir, peningkatan jumlah RTM tertinggi berada di Kecamatan Kampung melayu dengan peningkatan sebesar 1.650 atau meningkat sebesar 22,19%, di posisi kedua adalah kecamatan Ratu Agung dengan peningkatan sebesar 661 atau meningkat sebesar 20,51% dan di posisi ketiga adalah Kecamatan Ratu Agung dengan peningkatan sebesar 1.226 atau meningkat sebesar 18,11%.

Berdasarkan gambar C.6, diketahui bahwa peningkatan jumlah RTM pada tahun 2021-2023, tetapi

tidak berbanding lurus dengan persentase RTM KPM. Hal ini terlihat pada dua kecamatan yang RTM KPMnya berkurang dalam kurun waktu 2021-2023. Di Kecamatan Gading Cempaka, RTM KPM berkurang sebesar 9,3% dan di kecamatan Ratu Samban berkurang sebesar 6,09%. Namun, secara keseluruhan terdapat persentase RTM KPM di Kota Bengkulu mengalami peningkatan sebesar 7,46%. Khusus di wilayah pesisir, persentase RTM KPM tertinggi berada di kecamatan teluk segara dengan kenaikan sebesar 13,37%, di posisi kedua adalah kecamatan Ratu Agung dengan kenaikan sebesar 11,05% dan di posisi ketiga adalah kecamatan sungai serut dengan kenaikan sebesar 6,37%.

**Gambar C.7**  
**Sebaran RTM KPM di Wilayah Pesisir**  
**Kota Bengkulu Tahun 2021-2023**



Sumber: Diolah dari DTKS, 2023

Berdasarkan gambar C.7 di atas, diketahui bahwa jumlah RTM KPM terbesar berada di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu

dan RTM KPM terkecil berada di Kelurahan Sumur Meleleh Kecamatan Teluk Segara. Namun demikian, jika dilihat dari

keseluruhan wilayah pesisir maka tiga kelurahan dengan jumlah RTM KPM terbesar adalah Kelurahan Sumber Jaya di Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Malabero di Kecamatan Teluk Segara dan Kelurahan Pasar Bengkulu di Kecamatan Sungai Serut. Di kelurahan Sumber Jaya terdapat 2.053 RTM dengan jumlah jiwa sebesar 6.065, di kelurahan Malabero terdapat 516 RTM KPM dengan jumlah jiwa sebesar 956, dan di kelurahan Pasar Bengkulu terdapat 460 RTM KPM dengan jumlah jiwa sebesar 1.371.

Berdasarkan hasil analisis *word cloud* pada folder cases yang diambil diaplikasi Nvivo, dengan filter kata-kata yang sering muncul lebih dari 1000 kali dengan batasan lima kata, diketahui bahwa kata “Nelayan”, “Kemiskinan”, dan “Masyarakat” merupakan kata-kata yang paling banyak disebut oleh informan secara berurutan. Kata nelayan disebut yaitu sebanyak 231 kali, kata kemiskinan disebut sebanyak 165 kali dan kata masyarakat disebut sebanyak 144 kali. Kata nelayan paling banyak disebut karena kelompok nelayan menjadi fokus utama dalam wacana kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Kata "nelayan" paling banyak disebut mencerminkan urgensi dan signifikansi yang dimiliki kelompok nelayan terhadap dinamika pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Kata nelayan merujuk pada isu-isu seperti akses terhadap sumber daya laut, perlunya peningkatan keterampilan dan pelatihan bagi nelayan, dan kebutuhan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan kehidupan mereka. Selain itu, kata nelayan juga

memberikan pemahaman mendalam mengenai peran sentral nelayan dalam konteks pengentasan kemiskinan, memungkinkan peneliti dan pembuat kebijakan untuk merancang model kebijakan yang lebih fokus dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan pendekatan *collaborative governance*. Kemunculan kata "Kemiskinan" yang menempati peringkat kedua mencerminkan tingginya kesadaran dan perhatian terhadap isu kemiskinan sebagai fokus utama dalam pembahasan kebijakan. Kedudukan kata ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tetap menjadi pusat perhatian dan prioritas dalam upaya pengentasan di wilayah pesisir. Penurunan angka kemiskinan di kota Bengkulu khususnya di wilayah pesisir merupakan agenda yang sangat penting dan mendesak. Dengan demikian, kemunculan kata ini memberikan petunjuk tentang urgensi mengatasi masalah kemiskinan dan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan sangat diperlukan. Keberadaan kata "Kemiskinan" dalam posisi kedua juga menegaskan bahwa masalah ini dianggap sebagai permasalahan yang kompleks yang perlu penanganan serius melalui upaya kolaboratif antar aktor dari berbagai pihak terkait. Kemunculan kata "Masyarakat" sebagai yang paling banyak ketiga menggambarkan bahwa peran serta dan aspirasi masyarakat memiliki bobot penting dalam perbincangan tentang kebijakan pengentasan kemiskinan. Kedudukan kata ini menunjukkan bahwa masyarakat di





ini yang menyebabkan para nelayan tradisional banyak yang terjerat hutang kepada tengkulak, toke, rentenir atau koperasi. Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi alam dan lingkungan saat ini (pada saat dilakukan penelitian) sedang tidak bersahabat dengan para nelayan. Cuaca sedang tidak bersahabat dan kondisi ekosistem laut yang sudah rusak parah. Akibatnya masyarakat nelayan tradisional sangat tertatih-tatih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan kapal *trawl* yang masih marak beroperasi diperairan laut di wilayah Kota Bengkulu, limbah industri yang dibuang ke laut atau terbawa ke laut dan keberadaan sampah plastik yang berada di laut merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan/ekosistem laut.

**Kedua, Masalah Kebijakan.** Meskipun tidak populer di kalangan masyarakat, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa masalah pengentasan kemiskinan selanjutnya adalah masalah kebijakan. Masalah kebijakan ini merupakan masalah yang paling krusial dan paling mempengaruhi keberhasilan atau efektivitas program pengentasan kemiskinan. Masalah kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam 3 dimensi yaitu (1) dimensi formulasi; (2) dimensi implementasi; (3) dimensi evaluasi.

**Dimensi formulasi.** Pada dimensi ini, masalah pengentasan kemiskinan terdiri dari tiga variabel yaitu *Pendefinisian Masalah, Tujuan Kebijakan* dan *Substansi Kebijakan*.  
*Pendefinisian Masalah*

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidaktepatan atau kekeliruan pada pendefinisian

masalah dalam kebijakan/program pengentasan kemiskinan. *Pertama*, masalah kemiskinan dan masalah pengentasan kemiskinan ditetapkan sama, baik di wilayah pesisir, wilayah gunung, wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan/program utama pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dibawah komando dan koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Bantuan Langsung Tunai/Non Tunai memiliki substansi kebijakan/program yang sama untuk seluruh masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Tidak peduli mereka di pegunungan, di wilayah pesisir, di perkotaan, atau di pedesaan, substansi kebijakannya sama, sehingga pemberlakuannya pun sama. Hal ini sangat disayangkan karena masalah kemiskinan dan pengentasan kemiskinan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kebijakan/program pengentasan kemiskinan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik kemiskinan masing-masing wilayah. *Kedua*, terdapat kekeliruan dalam mendefinisikan kriteria penerima program pengentasan kemiskinan untuk nelayan. Saat ini, yang menjadi persyaratan penerima program pengentasan kemiskinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah nelayan yang menjadi anggota kelompok nelayan dan memiliki "Kartu Kusuka". Nelayan yang tidak menjadi anggota kelompok nelayan dan tidak memiliki Kartu Kusuka dengan sendirinya akan tersisih dari penerima program pengentasan kemiskinan, meskipun mereka sangat layak menjadi penerima

program/bantuan tersebut. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa cukup banyak nelayan yang tidak menjadi anggota kelompok dan tidak memiliki kartu kusuka. Nelayan yang tidak menjadi anggota kelompok disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk berkelompok dan/atau karena adanya resistensi dari anggota kelompok lain. Nelayan yang tidak mampu berkelompok disebabkan oleh terbatasnya waktu untuk berinteraksi dengan pemilik kelompok atau anggota kelompok senior karena mereka menjadi buruh kapal yang banyak menghabiskan waktu di tengah laut, sedangkan mereka yang mendapatkan resistensi menjadi anggota kelompok dari pemilik kelompok atau anggota kelompok lama disebabkan oleh perbedaan etnis, suku, agama dan hubungan interaksi sang nelayan terhadap lingkungannya. Selain itu, memang terdapat kelompok nelayan yang menutup diri untuk anggota lain atau anggota baru karena alasan yang tidak rasional. Nelayan yang tidak memiliki kartu kusuka bukan karena mereka tidak mau memilikinya, tetapi disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap manfaat kartu kusuka tersebut. Tidak sedikit nelayan yang tidak mengetahui apa manfaat memiliki kartu tersebut dan bagaimana cara mendapatkannya. Akibat ditetapkannya persyaratan penerima program pengentasan kemiskinan seperti bantuan perahu, kapal, mesin perahu/kapal, dan jaring adalah nelayan yang harus menjadi anggota kelompok nelayan dan memiliki kartu kusuka maka terjadilah praktik percaloan kartu kusuka dan lahirnya kelompok-

kelompok nelayan dadakan atau kelompok nelayan semu. Dikatakan semu karena kelompok ini ada dan dibentuk hanya karena ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah. Biasanya kelompok ini memiliki akses dengan oknum pejabat dari institusi yang berwenang mendistribusikan bantuan.

#### *Tujuan Kebijakan*

Kebijakan yang memiliki tujuan kebijakan yang kurang jelas dan kurang terukur akan mempengaruhi kualitas substansi kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa semua kebijakan/program pengentasan kemiskinan utama yang diteliti seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Langsung Tunai/Non Tunai dan program pengentasan kemiskinan tambahan seperti bantuan perahu, kapal, mesin, jaring, GPS dll tidak satu pun yang memiliki tujuan kebijakan yang jelas dan terukur. Jelas dan tidaknya tujuan kebijakan pengentasan kemiskinan, dan terukur dan tidaknya kebijakan pengentasan kemiskinan yang diteliti diidentifikasi dan dianalisis menggunakan kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant dan Time Bound*). Tujuan kebijakan yang kurang jelas dan kurang terukur ini dapat mengakibatkan terjadinya distorsi dalam implementasi kebijakan karena akan sangat rentan disalahgunakan oleh oknum birokrat yang tidak berintegritas. Idealnya sebuah kebijakan/program memiliki tujuan kebijakan/program yang jelas dan terukur sesuai dengan kriteria SMART agar kebijakan tersebut memiliki kinerja kebijakan yang baik.

#### *Substansi Kebijakan*

Penelitian ini menemukan beberapa masalah yang terkait dengan substansi kebijakan. *Pertama*, ditemukan bahwa semua kebijakan/program pengentasan kemiskinan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tidak ada satu yang menyentuh psikologis keluarga miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian (Putra, 2020; Putra & Abbas, 2019) yang menyatakan bahwa keluarga penerima manfaat program pengentasan kemiskinan tidak mendapatkan *treatment* agar keluarga miskin tersebut memiliki motivasi yang tinggi untuk keluar dari kemiskinan. Akibatnya, banyak dari keluarga miskin yang menjadi keluarga penerima manfaat program pengentasan kemiskinan menikmati kemiskinannya. Hal ini sangat disayangkan karena tujuan program pengentasan kemiskinan secara umum adalah menyembuhkan yang miskin atau mengeluarkan keluarga miskin dari garis kemiskinan dan mencegah yang belum miskin menjadi miskin atau mengantisipasi masyarakat yang rentan menjadi keluarga miskin. *Kedua*, Program Pengentasan Kemiskinan saat ini hanya fokus pada kelompok kemiskinan kronis, mutlak atau kemiskinan absolute dan mengabaikan kelompok kemiskinan transient (kemiskinan musiman). Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas masyarakat pesisir merupakan kelompok kemiskinan transient karena dalam satu tahun nelayan di wilayah pesisir hanya memiliki waktu 6 bulan masa panen (masa produktif, hasil tangkap yang cukup memadai atau berlimpah) sedangkan 6 bulan lainnya adalah masa paceklik (mendapatkan hasil

tangkapan yang sangat sedikit, tidak mendapatkan tangkapan sama sekali atau tidak bisa melaut karena kondisi alam yang tidak bisa dikontrol oleh nelayan. Penelitian (Santoso, 2018) menyatakan bahwa kelompok kemiskinan transient yang diabaikan ini merupakan faktor kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka survival dan beradaptasi yang sangat baik. Mereka dapat bertahan dalam kondisi kritis meskipun tanpa bantuan dari pemerintah. Penelitian ini mendiagnosis bahwa pemerintah telah keliru dalam upaya mengentaskan kemiskinan karena mengabaikan kelompok kemiskinan transient. Kelompok kemiskinan transient (mayoritas masyarakat pesisir) dapat menjadi titik ungkit dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah pesisir. Temuan penelitian ini mampu menjawab pertanyaan mengapa kemiskinan ekstrim atau kronis mayoritas terkonsentrasi di wilayah pesisir. Dengan demikian, untuk mengentaskan masalah kemiskinan khususnya di wilayah pesisir diperlukan adanya perubahan orientasi kebijakan yang termuat jelas di dalam substansi kebijakan. Perubahan orientasi yang dimaksud adalah tidak hanya fokus pada kemiskinan kronis tetapi juga fokus pada kemiskinan transient.

#### ***Dimensi Implementasi***

Pada dimensi ini, masalah pengentasan kemiskinan terdiri dari dua variabel yaitu masalah penegakan hukum dan masalah pengawasan. Masalah penegakan hukum dan pengawasan ini merupakan dua masalah yang berkaitan tetapi berada pada titik kontinum yang berbeda.

Penegakan hukum fokus pada upaya kuratif sedangkan pengawasan fokus pada upaya preventif. Namun demikian, keduanya harus dilakukan secara bersama-sama agar masalah pengentasan kemiskinan dari aspek kebijakan pada dimensi implementasi dapat diatasi.

#### *Masalah Penegakan Hukum*

Masalah penegakan hukum sangat krusial dalam konteks masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir merupakan nelayan tradisional sangat tergantung dengan hasil laut, sementara hasil laut sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan lingkungan. Lemahnya penegakan hukum kepada nelayan yang menggunakan *trawl* merupakan akar penyebab kerusakan terumbu karang dan ekosistem di laut di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Kerusakan laut yang begitu parah membuat nelayan tradisional kesulitan mendapatkan ikan dan hasil laut lainnya. Kendati sudah sering menyampaikan keluhan kepada pemerintah, melaporkan keberadaan nelayan *trawl* kepada pihak yang berwajib dan sudah terjadi beberapa kali perkelahian antara nelayan tradisional dengan nelayan *trawl* yang menimbulkan korban luka dan meninggal dunia, akan tetapi keberadaan kapal *trawl* yang jelas-jelas sudah dilarang masih terus beroperasi, bahkan beroperasinya di wilayah tangkap nelayan tradisional. Pelarangan pengguna *trawl* sudah diatur sejak tahun 1985 melalui Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl* dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, lalu secara represif

melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seines Nets*). Ancaman untuk pengguna *trawl* tidak main-main, kejahatan alat tangkap yang merusak tersebut diancam dengan Pasal 85 UU No. 45/2009 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar. Penyebab kapal *trawl* tersebut terus menerus beroperasi adalah karena adanya dukungan atau perlindungan dari oknum aparat penegak hukum atau dari oknum pejabat militer atau dari oknum pejabat sipil atau oknum pemodal yang memiliki pengaruh terhadap proses penegakan hukum. Lebih parahnya lagi, ada oknum pejabat yang menjadi pemilik kapal-kapal *trawl* yang beroperasi tersebut. Dengan demikian, masalah penegakan hukum ini bila tidak diperbaiki maka akan semakin membuat kapal-kapal *trawl* terus beroperasi dan dengan beroperasinya kapal *trawl* tersebut akan membuat alam dan lingkungan semakin rusak. Kerusakan alam atau lingkungan seperti terumbu karang, sarang ikan dan biota laut lainnya yang terus terjadi dapat merusak atau memutus sistem rantai makanan di laut. Pada kondisi tertentu, ikan-ikan tidak bisa bertelur di daerah jelajah nelayan tradisional karena tempatnya bertelur sudah tidak ada dan tidak mau bermain atau mencari makan di daerah tersebut karena terumbu karang dan biota laut sudah rusak parah. Kondisi ini yang membuat jumlah ikan yang berada di daerah jelajah nelayan tradisional semakin

hari semakin sedikit. Hal ini yang sangat kondisi kemiskinan di wilayah pesisir semakin memburuk.

#### *Masalah Pengawasan*

Masalah pengawasan merupakan salah satu masalah implementasi yang krusial. Ada banyak penyimpangan, bias atau distorsi dalam implementasi karena tidak ada pengawasan dan/atau karena pengawasan belum optimal. Pengawasan *concern* pada upaya preventif agar penggunaan trawl khususnya di wilayah tangkap nelayan tradisional dapat dicegah atau diminimalisir. Pengawasan atau patroli ini dapat dilakukan secara konvensional dengan menugaskan para aparat penegak hukum di wilayah tangkap nelayan tradisional pada posisi, waktu dan jam tertentu. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi seperti satelit dan drone yang beroperasi dalam waktu 1 x 24 jam pada beberapa titik krusial khususnya di wilayah tangkap nelayan tradisional. Meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan terhadap kapal trawl ini menjadi sangat penting karena cara ini efektif untuk meminimalisir beroperasinya kapal trawl. Jika frekuensi dan kualitas pengawasan tidak ditingkatkan maka keberadaan dan kondisi nelayan tradisional yang berada di wilayah pesisir akan semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Selain itu, pengawasan yang ditingkatkan ini dapat mencegah terjadinya kembali bentrok berdarah antara nelayan tradisional dengan nelayan trawl.

#### *Dimensi Evaluasi*

Pada dimensi ini, masalah pengentasan kemiskinan terdiri dari tiga variabel yaitu kuantitas, evaluasi,

kualitas evaluasi dan tindaklanjut evaluasi.

#### *Kuantitas Evaluasi*

Berdasarkan hasil pencarian artikel penelitian di google scholar dengan judul “Evaluasi Pengentasan Kemiskinan” dalam kurun waktu 2010-2023 dengan menggunakan aplikasi Publish or Perish, ditemukan bahwa hanya terdapat 37 artikel penelitian. Dari 37 artikel tersebut tidak ada satu pun yang mengevaluasi program pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan tidak ada satu pun yang mengevaluasi program pengentasan kemiskinan di Kota Bengkulu. Dengan demikian, jelas bahwa kuantitas evaluasi program pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan kuantitas evaluasi program pengentasan kemiskinan di Kota Bengkulu oleh para akademisi, peneliti atau profesional yang *concern* dengan pengentasan kemiskinan masih sangat terbatas. Hal ini sangat disayangkan karena jumlah penduduk miskin di kota Bengkulu khususnya di wilayah pesisir masih menjadi kantong-kantong kemiskinan, sehingga memerlukan penelitian-penelitian yang menilai keberhasilan, efektivitas, kinerja atau dampak program pengentasan kemiskinan yang sudah diimplementasikan dengan jumlah yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, tidak teridentifikasi adanya evaluasi program pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir oleh analisis kebijakan, teknokrat dan birokrat.

#### *Kualitas Evaluasi dan Tindak Lanjut*

Kualitas evaluasi menjadi masalah karena tidak sedikit evaluasi kebijakan/program tertentu yang mengalami bias. Bias tersebut bisa disebabkan oleh *conflict of interest*

antara evaluator dengan objek yang dievaluasi. Ada juga evaluator yang tidak menyampaikan hasil evaluasi yang sebenarnya dikarenakan adanya permintaan khusus dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, ada juga evaluasi yang dilakukan secara asal-asalan, tidak menggunakan metode yang tepat, terukur dan sah. Namun demikian, dikarenakan tidak teridentifikasi adanya evaluasi program-program pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Bengkulu maka kualitas dan tindaklanjut tidak bisa dilihat seperti apa dan bagaimana.

#### **Ketiga, Masalah Individu Nelayan.**

Jika masalah yang pertama dan kedua adalah masalah yang tidak bisa dikendalikan oleh nelayan, maka masalah yang ketiga ini merupakan masalah yang dapat dikontrol oleh nelayan. Dengan kata lain, para nelayan memiliki kuasa terhadap masalah ini, akan tetapi para nelayan tidak menganggap hal ini sebagai masalah yang perlu atau harus diselesaikan. *Pertama*, alat tangkap yang tidak memadai. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa para nelayan sangat mampu untuk meningkatkan kualitas alat tangkap dan alat bantu tangkap mereka. Meningkatkan kualitas tangkap dan alat bantu tangkap ini dapat dilakukan dengan membeli atau memperbaikinya pada saat musim ikan. Hanya saja mayoritas masyarakat nelayan tidak mau melakukannya karena mereka tidak menyadari bahwa peningkatan kualitas alat tangkap dan alat bantu tangkap adalah sesuatu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil

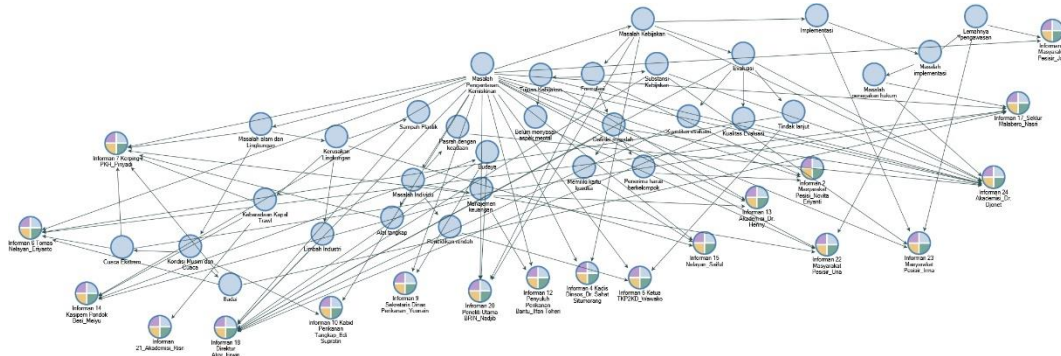
tangkapan mereka. Konsekuensinya adalah mereka tidak mampu meningkatkan hasil tangkapan mereka baik pada saat musim ikan atau tidak. Bahkan, yang lebih menyedihkan adalah sebagian besar nelayan yang mendapatkan bantuan alat tangkap ikan justru menjualnya dengan alasan yang irasional atau alasan kepepet. Dengan demikian, jika alat tangkap dan alat bantu tangkap tidak memadai maka tidak heran hasil tangkapan nelayan tradisional juga sedikit. *Kedua*, nilai-nilai budaya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat yang berkembang di wilayah pesisir adalah budaya konsumtif dan suka berfoya-foya. Budaya konsumtif dan berfoya-foya ini mencapai titik kulminasi pada saat musim ikan. Pada musim ikan, keluarga nelayan menganggap hal yang biasa bila menghabiskan uang jutaan rupiah dalam satu hari hanya untuk bersenang-senang. Sebagian dari mereka melakukan foya-foya atau bersenang-senang meskipun tidak memiliki tabungan karena menganggap hal tersebut adalah balas dendam setelah sekian lama hidup dalam suasana yang serba kekurangan. Filosofi hidup masyarakat pesisir memang berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah non pesisir. Hal ini disebabkan oleh masyarakat nelayan tidak terlibat sejak awal dalam proses produksi layaknya para petani. Jika petani dari pembibitan sampai panen mereka terlibat, sedangkan nelayan sama sekali tidak terlibat sampai pada fase sebelum penangkapan. Masyarakat

pesisir dalam keseharian hidupnya dipenuhi oleh rutinitas yang penuh dengan ketidakpastian. Perbedaan inilah yang membuat filosofi hidup masyarakat pesisir lebih spekulatif dalam mengambil keputusan. *Ketiga*, manajemen keuangan keluarga yang buruk. Manajemen keuangan yang buruk juga menjadi masalah pengentasan kemiskinan yang melekat kepada individu nelayan. Manajemen keuangan yang buruk dipengaruhi oleh filosofi hidup masyarakat pesisir yang berimplikasi pada pengambilan keputusan yang cenderung spekulatif sehingga sulit bagi untuk meyakinkan mereka bahwa menabung jauh lebih baik dari pada menghabiskan hasil panen ikan dalam satu hari pada saat musim ikan. Selain itu, manajemen keuangan yang buruk juga disebabkan oleh tingkat pendidikan atau literasi tentang manajemen keuangan yang rendah. *Keempat*, kurangnya motivasi diri untuk keluar dari garis kemiskinan atau memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Kondisi jamak ditemukan baik di wilayah pesisir, wilayah agraris, wilayah perkotaan, dan wilayah pedesaan. Di wilayah pesisir, rendahnya motivasi untuk keluar dari garis kemiskinan terlihat dari semangat untuk pergi kelaut terutama pada musim panen atau musim ikan. Tidak sedikit ditemukan nelayan yang tidak mau pergi melaut hanya karena cadangan ikan atau uang masih ada untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Selain itu, pada saat kondisi alam yang tidak bersahabat atau hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya operasional melaut maka

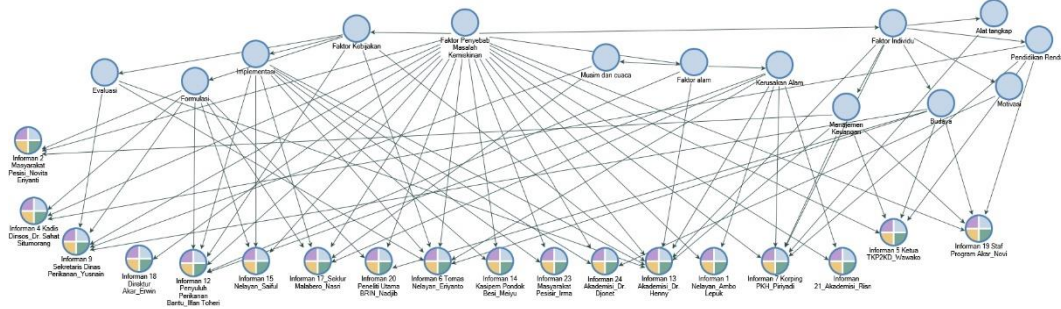
mayoritas masyarakat pesisir tidak mau untuk mencari uang dengan cara yang berbeda misalnya dengan berdagang, membuat kerajinan tangan, atau menjadi buruh. Mereka seperti menikmati kemiskinannya sembari mengharapkan uluran tangan dari pemerintah, sanak keluarga atau tetangga. *Kelima*, tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah ini mempengaruhi masalah-masalah individu seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesadaran untuk meningkatkan kualitas alat tangkap atau alat bantu tangkap, nilai-nilai budaya, manajemen keuangan yang buruk, dan rendahnya motivasi untuk keluar dari kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dengan kata lain, tingkat pendidikan merupakan titik ungkit untuk mengatasi masalah individu yang melekat pada nelayan. Namun demikian, diperlukan pendekatan yang berbeda dan kontekstual agar semua masyarakat pesisir menyadari bahwa menempuh pendidikan merupakan suatu keharusan dan dapat menikmati proses pendidikan tersebut. Sebagai contoh, kebijakan pembayaran uang sekolah untuk anak-anak nelayan harus dibuat lebih fleksibel karena masyarakat nelayan memiliki penghasilan yang tidak sama setiap hari, bulan dan tahunnya. Tidak sedikit anak nelayan yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah karena malu selalu ditagih pihak sekolah biaya sekolah. Berikut ini merupakan gambar project map masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Kota Bengkulu dan

project map faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**Gambar C.9**  
**Project Map Masalah Pengentasan Kemiskinan**



**Gambar C.10**  
**Project Map Faktor yang mempengaruhi Masalah Pengentasan Kemiskinan**



Berdasarkan gambar C.9 dan C.10 di atas diketahui bahwa masalah pengentasan kemiskinan tersebut disebabkan atau dipengaruhi oleh masalah pengentasan kemiskinan itu sendiri. Dengan kata lain, jika ingin

menyelesaikan masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir maka tidak ada pilihan lain selain menyelesaikan faktor penyebabnya terlebih dahulu.

**D. Kesimpulan dan Saran**  
**Kesimpulan**

1) Masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir sangat kompleks karena masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir terdiri dari berbagai variabel yang saling berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dipengaruhi oleh

tiga variabel utama dan masing-masing variabel memiliki sub variabel.

2) Pertama, Masalah Alam dan Lingkungan. Masalah alam dan lingkungan ini menjadi masalah pertama yang menyebabkan atau mempengaruhi kemiskinan di wilayah pesisir karena adalah karena mayoritas masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir adalah nelayan



tradisional. Nelayan tradisional penghasilannya tergantung pada hasil laut atau hasil tangkapan ketika melaut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi cuaca sedang tidak bersahabat dan ekosistem laut yang sudah rusak parah. Akibatnya masyarakat nelayan tradisional sangat tertatih-tatih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan kapal trawl yang masih marak beroperasi diperairan laut di wilayah Kota Bengkulu, limbah industri yang dibuang ke laut atau terbawa ke laut dan keberadaan sampah plastik yang berada di laut merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan/ekosistem laut.

- 3) Kedua, Masalah Kebijakan. Meskipun tidak populer di kalangan masyarakat, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa masalah pengentasan kemiskinan selanjutnya adalah masalah kebijakan. Masalah kebijakan ini merupakan masalah yang paling krusial dan paling mempengaruhi keberhasilan atau efektivitas program pengentasan kemiskinan. Masalah kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam 3 dimensi yaitu (1) dimensi formulasi; (2) dimensi implementasi; (3) dimensi evaluasi.
- 4) Ketiga, masalah Individu nelayan. Masalah yang ini merupakan masalah yang dapat dikontrol oleh para nelayan karena memiliki kuasa terhadap

masalah ini. Namun, masyarakat nelayan enggan melakukannya karena tidak menganggap hal ini sebagai masalah yang perlu atau harus diselesaikan. Masalah individu ini terdiri dari enam variabel. *Pertama*, alat tangkap dan alat bantu tangkap yang tidak memadai. *Kedua*, nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya masyarakat yang berkembang di wilayah pesisir adalah budaya konsumtif dan suka berfoya-foya. Hal ini dipengaruhi oleh filosofi hidup masyarakat nelayan yang penuh dengan ketidakpastian sehingga keputusan-keputusan yang mereka buat cenderung bersifat spekulatif. *Ketiga*, Manajemen keuangan yang buruk juga menjadi masalah pengentasan kemiskinan yang melekat kepada individu nelayan. *Keempat*, kurangnya motivasi diri untuk keluar dari garis kemiskinan atau memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Di wilayah pesisir, rendahnya motivasi untuk keluar dari garis kemiskinan terlihat dari tidak mau pergi kelaut hanya karena cadangan ikan atau uang masih ada untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Selain itu, mayoritas masyarakat pesisir tidak mau untuk mencari uang dengan cara yang berbeda seperti dengan berdagang, membuat kerajinan tangan, atau menjadi buruh ketiga sedang tidak memungkinkan pergi melaut. Mereka cenderung menikmati kemiskinannya sembari

mengharapkan uluran tangan dari pemerintah, sanak keluarga atau tetangga. *Kelima*, tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah ini mempengaruhi tingkat kesadaran untuk meningkatkan kualitas alat tangkap atau alat bantu tangkap, nilai-nilai budaya, manajemen keuangan yang buruk, dan rendahnya motivasi untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, tingkat pendidikan merupakan titik unkit untuk mengatasi masalah individu yang melekat pada nelayan.

- 5) Untuk menyelesaikan masalah pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir tidak bisa dilakukan secara parsial, akan tetapi harus dilakukan secara komprehensif yang dimulai dari akar masalahnya dan mengoptimalkan treatment pada titik unkit penyelesaian masalah.

### **Rekomendasi/Saran**

- 1) Intervensi Lingkungan dan Alam:
  - a) Mendorong regulasi ketat terhadap kapal trawl dan pengelolaan limbah industri.
  - b) Menggalakkan program restorasi ekosistem laut untuk meningkatkan produktivitas sumber daya laut.
- 2) Reformasi Kebijakan:
  - a) Menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan

dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk nelayan dan pakar kebijakan.

- b) Meningkatkan transparansi dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan untuk meminimalkan risiko ketidaksetaraan.
- 3) Pemberdayaan Individu Nelayan:
    - a) Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan manajemen keuangan nelayan.
    - b) Mendorong perubahan nilai budaya dengan program pendidikan dan kampanye sosial.
    - c) Menyediakan insentif bagi nelayan yang berusaha keluar dari kemiskinan melalui diversifikasi ekonomi.
  - 4) Pendidikan Sebagai Pemecah Masalah:
    - a) Mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah pesisir.
    - b) Mengembangkan program pendidikan khusus untuk nelayan yang berfokus pada keberlanjutan sumber daya dan keterampilan manajemen keuangan.
  - 5) Pendekatan Komprehensif:
    - a) Mendorong keterlibatan lintas sektor dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.

- b) Memastikan bahwa solusi diterapkan secara holistik, mengatasi semua variabel utama dan sub-variabel yang ditemukan.

### Ucapan Terima Kasih

- 1) Tim peneliti menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini melalui Surat Keputusan Nomor: 0536/E5/PG.02.00/2023 dan Perjanjian/Kontrak Nomor: 175/E5/PG.02.00.PL/2023 Tahun Pendanaan 2023.
- 2) Tim Peneliti menyampaikan terima kasih kepada seluruh informan dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan peneliti ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E., d'Orey, M. A. J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2018). Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis. *World Development*, *103*, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>
- Appadurai, A. (2004). *The capacity to aspire: Culture and the terms of recognition*. Stanford University Press.
- Asadullah, M. N., Savoia, A., & Sen, K. (2020). Will South Asia Achieve the Sustainable Development Goals by 2030? Learning from the MDGs Experience. *Social Indicators Research*, *152*(1), 165–189. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02423-7>
- Atkinson, A. B. (2003). Income inequality in OECD countries: Data and explanations. *CESifo Economic Studies*, *49*(4), 479–513.
- Azeem, M. M., Mugera, A. W., & Schilizzi, S. (2019). Do Social Protection Transfers Reduce Poverty and Vulnerability to Poverty in Pakistan? Household Level Evidence from Punjab. *Journal of Development Studies*, *55*(8), 1757–1783. <https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1448068>
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Kota Bengkulu dalam Angka 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Baloch, M. A., Danish, Khan, S. U. D., Ulucak, Z. Ş., & Ahmad, A. (2020). Analyzing the relationship between poverty, income inequality, and CO2 emission in Sub-Saharan African countries. *Science of the Total Environment*, *740*. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139867>
- Becker, G. S. (2005). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, particularly regarding*

- education. University of Chicago Press.
- Chowdhury, R., & Willmott, H. (2019). Microcredit, the corporatization of nongovernmental organizations, and academic activism: The example of Professor Anu Muhammad. *Organization*, 26(1), 122–140. <https://doi.org/10.1177/1350508418768002>
- Creswell, Jhon. W. (2014). *Research-Design Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches* (4th ed., Vol. 4).
- Dawson, N., Martin, A., & Camfield, L. (2019). Can agricultural intensification help attain Sustainable Development Goals? Evidence from Africa and Asia. *Third World Quarterly*, 40(5), 926–946. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1568190>
- Deaton, A. (2010). Instruments of development: Randomization in the tropics, and the search for the elusive keys to economic growth. *Proceedings of the British Academy*, 162, 123–166.
- de Jong, E., & Vijge, M. J. (2021). From Millennium to Sustainable Development Goals: Evolving discourses and their reflection in policy coherence for development. *Earth System Governance*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100087>
- Dewi, S., Abd Majid, M. S., Aliasuddin, & Kassim, S. (2018). Dynamics of Financial Development, Economic Growth, and Poverty Alleviation: The Indonesian Experience. *South East European Journal of Economics and Business*, 13(1), 17–30. <https://doi.org/10.2478/jeb-2018-0002>
- Elson, D. (2002). Gender justice, human rights and neo-liberal economic policies. *Gender and Development*, 10(1), 51–61.
- Eyasu, A. M. (2020). Determinants of poverty in rural households: Evidence from North-Western Ethiopia. *Cogent Food and Agriculture*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2020.1823652>
- Feriyanto, N., El Aiyubbi, D., & Nurdany, A. (2020). The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product on Poverty Reduction In Provinces of Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 10(10), 1088–1099. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099>
- Forestier, O., & Kim, R. E. (2020). Cherry-picking the Sustainable Development Goals: Goal prioritization by national governments and implications for global governance. *Sustainable Development*, 28(5), 1269–1278. <https://doi.org/10.1002/sd.2082>
- Fraser, N. (2009). Feminism, capitalism, and the cunning of history. *New Left Review*, 56, 97–117.
- Geertz, C. (2000). *Available light: Anthropological reflections on philosophical topics*. Princeton University Press.
- Halisçelik, E., & Soytaş, M. A.

- (2019). Sustainable development from millennium 2015 to Sustainable Development Goals 2030. *Sustainable Development*, 27(4), 545–572.  
<https://doi.org/10.1002/sd.1921>
- Huynh, C. M., & Nguyen, T. L. (2020). Shadow economy and income inequality: new empirical evidence from Asian developing countries. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 25(1), 175–192.  
<https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1643196>
- Indraswari, Laksmi. D. (2023, January 26). Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan. *Kompas ID*.
- Islam, M. S., & Alam, K. (2018). Does social capital reduce poverty? A cross-sectional study of rural households in Bangladesh. *International Journal of Social Economics*, 45(11), 1515–1532.  
<https://doi.org/10.1108/IJSE-07-2017-0295>
- Kang, K., Wang, M., & Luan, X. (2021). Decision-making and coordination with government subsidies and fairness concerns in the poverty alleviation supply chain. *Computers and Industrial Engineering*, 152.  
<https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.107058>
- Khoshnava, S. M., Rostami, R., Zin, R. M., Štreimikiene, D., Yousefpour, A., Strielkowski, W., & Mardani, A. (2019). Aligning the green economy (GE) criteria and sustainable development goals (SDGs) to implement sustainable development. *Sustainability (Switzerland)*, 11(17).  
<https://doi.org/10.3390/su11174615>
- Kousar, R., Rais, S. I., Mansoor, A., Zaman, K., Shah, S. T. H., & Ejaz, S. (2019). The impact of foreign remittances and financial development on poverty and income inequality in Pakistan: Evidence from ARDL - bounds testing approach. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(1), 71–81.  
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no1.71>
- Li, E., Deng, Q., & Zhou, Y. (2022). Livelihood resilience and the generative mechanism of rural households out of poverty: An empirical analysis from Lankao County, Henan Province, China. *Journal of Rural Studies*, 93, 210–222.  
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.005>
- Liu, Y. L., Zhu, K., Chen, Q. Y., Li, J., Cai, J., He, T., & Liao, H. P. (2021). Impact of the covid-19 pandemic on farm households' vulnerability to multidimensional poverty in rural China. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–16.  
<https://doi.org/10.3390/su13041842>
- Luo, C., Li, S., & Sicular, T. (2020). The long-term evolution of national income inequality and rural poverty in China. *China Economic Review*, 62.  
<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2020.101465>
- Majid, M. S. A., Dewi, S., Aliasuddin, & Kassim, S. H.

- (2019). Does Financial Development Reduce Poverty? Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of the Knowledge Economy*, 10(3), 1019–1036. <https://doi.org/10.1007/s13132-017-0509-6>
- Marsinta, A., I\*, A., Ario, B., & Fitra Ramadhan, A. (2020). Impact of Education on Poverty and Health: Evidence from Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 9(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Mustapa, W. N. binti W., Al Mamun, A., & Ibrahim, M. D. (2018). The economic impact of development initiatives on low-income households in Kelantan, Malaysia. *Social Sciences*, 7(7). <https://doi.org/10.3390/socsci7070118>
- Nansadiqa, L., Masbar, R., & Majid, M. S. (2019). Does Economic Growth Matter For Poverty Reduction In Indonesia? *East African Scholars of Economics, Business, and Management*, 2(2). <https://doi.org/DOI:10.36349/easjebm.2019.v02i02.002>
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Omodero, C. O. (2019). Government sectoral expenditure and poverty alleviation in Nigeria. *Research in World Economy*, 10(1), 80–90. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n1p80>
- Oviedo-García, M. Á., González-Rodríguez, M. R., & Vega-Vázquez, M. (2019). Does Sun-and-Sea All-Inclusive Tourism Contribute to Poverty Alleviation or Income Inequality Reduction? The Case of the Dominican Republic. *Journal of Travel Research*, 58(6), 995–1013. <https://doi.org/10.1177/0047287518789272>
- Pan, W., Fu, H., & Zheng, P. (2020). Regional poverty and inequality in the Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou city cluster in China Based on NPP/VIIRS night-time light imagery. *Sustainability (Switzerland)*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/su12062547>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Putra, B. M. (2020). Implementation of Poverty Alleviation Programs in Batam City. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 19–34. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1160>
- Putra, B. M., & Abbas, A. (2019, December). Evaluation of Poverty Reduction Programs in Batam City. *Strengthening the Role of Public Administration in the Global Changing Society*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.256>
- Sachs, Jeffrey. D. (2005). *The end of poverty : economic possibilities for our time*. Penguin Press.

- Santoso, D. (2018). *Penduduk miskin transient: masalah kemiskinan yang terabaikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Schleicher, J., Schaafsma, M., & Vira, B. (2018). Will the Sustainable Development Goals address the links between poverty and the natural environment? *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 34, 43–47. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.09.004>
- Schultz, T. P. (2022). Why governments should invest more in educating girls. *World Development*, 30(2), 207–225.
- Sen, Amartya. (2001). The many faces of poverty: Comparisons and controversies. *World Economic*, 2(2), 1–17.
- Sharma, S. V., Han, P., & Sharma, V. K. (2019). Socio-economic determinants of energy poverty amongst Indian households: A case study of Mumbai. *Energy Policy*, 132, 1184–1190. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.06.068>
- Su, F., Song, N., Ma, N., Sultanaliev, A., Ma, J., Xue, B., & Fahad, S. (2021). An assessment of poverty alleviation measures and sustainable livelihood capability of farm households in rural China: A sustainable livelihood approach. *Agriculture (Switzerland)*, 11(12). <https://doi.org/10.3390/agriculture11121230>
- Ullah, A., Kui, Z., Ullah, S., Pinglu, C., & Khan, S. (2021). Sustainable utilization of financial and institutional resources in reducing income inequality and poverty. *Sustainability (Switzerland)*, 13(3), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su13031038>
- Wan, G., Hu, X., & Liu, W. (2021). China's poverty reduction miracle and relative poverty: Focusing on the roles of growth and inequality. *China Economic Review*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101643>
- Wan, G., Wang, C., & Zhang, X. (2021). The Poverty-Growth-Inequality Triangle: Asia 1960s to 2010s. *Social Indicators Research*, 153(3), 795–822. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02521-6>
- Wang, W., Lan, Y., & Wang, X. (2021). Impact of livelihood capital endowment on poverty alleviation of households under rural land consolidation. *Land Use Policy*, 109. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105608>
- Wilkinson, R. G. , & M. M. (2003). Social determinants of health: The solid facts. *World Health Organization*.
- Yanwardhana, E. (2022, July 28). Wow! Potensi “Harta Karun” Laut Indonesia Capai Rp19.840 T. *CNBC Indonesia*.